

Judul : Jangan Terpancing 'People Power'
Tanggal : Senin, 13 Mei 2019
Surat Kabar : Indo Pos
Halaman : 2

Jangan Terpancing 'People Power'

JAKARTA-Wacana "people power" pasca Pemilu 2019 terus mengemuka. Ketua DPR RI Bambang Soesatyo meminta masyarakat tidak terpancing dengan ajakan tersebut dan fokus pada ibadah puasa dan persiapan menyongsong Lebaran Idul Fitri.

"Kita memiliki tanggung jawab yang sama agar Indonesia tetap kondusif, kendati ruang publik masih bising karena dijejali isu-isu hasil Pemilu 2019," ujarnya di Jakarta, Minggu (12/5).

Dia menyebutkan, Polri dan TNI yang terus memobilisasi aparat keamanan dan melakukan langkah-langkah persuasif mengenai wacana 'people power' menjadi bukti bahwa keamanan nasional dan ketertiban umum terjaga dan tetap dalam kendali TNI, Polri serta aparat hukum.

"Isu atau wacana tentang 'people power' dan revolusi telah direspons dengan bijaksana dan terukur oleh Polri," kata Bamsoet, sapaan akrab Bambang Soesatyo.

Politikus Partai Golkar itu menyatakan, pemerintah pun telah menunjuk sebuah tim untuk mengkaji aspek hukum dari uca-



CHARLIE/INDOPOS

pan atau pernyataan sejumlah pihak untuk mencegah terjadinya perpecahan bangsa.

Dia menilai, keputusan pemerintah dan Polri memilih pendekatan halus (*soft approach*) untuk isu 'people power' dan revolusi menjadi bukti bahwa aspek keamanan nasional dan ketertiban umum masih berada dalam kendali TNI, Polri dan aparat penegak hukum lainnya. "Itu juga bukti pemerintah bersama TNI dan Polri tidak panik," tandasnya.

Menurut Bamsoet, Indonesia pada dasarnya sangat kondusif hingga

menjelang pengumuman suara oleh KPU. Tidak ada alasan bagi masyarakat untuk cemas atau khawatir karena kebisingan isu-isu seperti hasil Pemilu 2019 tidak akan menjerumuskan negara ini dalam situasi tidak kondusif. "Tidak ada ketegangan yang mengganggu roda pemerintahan," tukasnya.

Terpisah, mantan hakim agung, Gayus Lumbuun menyatakan, kebebasan berpendapat tidaklah absolut. Oleh sebab itu, seruan 'people power' bisa menjadi delik makar bila dinilai mengancam dan

merongrong negara.

"Wacana 'people power' saat ini tidak tepat. Sebab, tidak ada kondisi yang memungkinkan 'people power' dapat terwujud, yakni pemerintahan otoriter, represif, serta krisis ekonomi," kata Gayus saat dihubungi, Minggu (12/5).

Wacana pengerahan kekuatan rakyat yang ada saat ini, yang digaungkan oleh sekelompok orang, cenderung mengarah ke gerakan makar. Sebab, gerakan 'people power' tidak ditujukan untuk keadilan masyarakat, tetapi lebih didasari oleh hasutan pihak tertentu untuk menyimpang dari hukum.

"Kebebasan berpendapat yang diatur UU No 9 Tahun 1998 tidak absolut, ada batasan yang harus dipatuhi," ujar hakim agung 2011-2018 itu.

Dia mencontohkan, pasal 9 ayat 1 UU tersebut memberikan batasan tempat-tempat yang tidak boleh dilakukan penyampaian pendapat yaitu di lingkungan istana kepresidenan, tempat ibadah, instalasi militer, rumah sakit, pelabuhan udara atau laut, stasiun kereta api, terminal angkutan darat, dan objek-objek vital nasional, serta pada hari besar nasional.

Selanjutnya, Pasal 15 juga menentukan bahwa pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum yang tidak sesuai dengan ketentuan dapat dibubarkan.

"Selain itu, UU tersebut mengadopsi International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR, Red) yang memberikan limitasi, yaitu mengganggu ketertiban publik, jangan mengganggu hak asasi, etika, dan moral. Keempat, tidak boleh mengancam keamanan nasional," cetus guru besar Universitas Krisnadwipayana (Unkris) Jakarta itu.

Makar, urainya, bertujuan menumbangkan pemerintahan yang sah hingga memecah belah bangsa. Oleh sebab itu, penegakan hukum terhadap pelaku makar harus tegas. Sebab, bila tidak, yang rugi adalah rakyat.

"Perbuatan makar sangat erat berkaitan dengan persatuan dan kesatuan bangsa. Oleh sebab itu, segala upaya yang menjurus kepada upaya memecah belah persatuan bangsa dan negara harus ditangani dengan tegas. Kerugian yang sangat besar akan ditanggung oleh rakyat apabila ketentuan perundangan tentang makar 'lemah'," tuntasnya. (aen)